

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, kecurangan laporan keuangan sangat diperhatikan. Kecurangan akuntansi, yang merupakan bagian dari korupsi biasanya mencakup tindakan seperti manipulasi, pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* berdampak negative pada ekonomi atau keuangan negara. Kecenderungan menunjukkan adanya indikasi untuk melakukan kecurangan. Dalam definisi, kecurangan akuntansi dapat didefinisikan sebagai tendensi korupsi karena jumlah elemen yang terdiri dari fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalagunaan kepercayaan, fakta kritis (Anggara, Yogi et., 2020). Dalam lingkup akuntansi, sering terjadi kesalahan dalam prosedur akuntansi yang berdampak pada laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi salah satu kesalahan ini dapat menyesatkan stakeholder atau pengguna laporan keuangan karena informasi dalam laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dari organisasi atau perusahaan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (PP No 71 Tahun 2010) dalam hal Standar Akuntansi Pemerintah, data dalam laporan keuangan pemerintah dianggap berkualitas tinggi jika memenuhi persyaratan akuntansi pemerintah, yang meliputi relevan dapat diandalkan, dapat dipahami, peraturan tersebut, laporan keuangan harus objektif, dapat diverifikasi, dan tanpa ketidakakurat yang signifikan dan menipu (Sinurat et al., 2023). Laporan keuangan sektor pamerintah dibuat agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dengan membandingkan anggaran yang ditetapkan dan yang telah terealisasi. Ini adalah bentuk tanggung jawab yang dilakukan dengan transparansi dan bentuk akuntabilitas atas kinerja entitas publik oleh karena itu, laporan keuangan seharusnya adil dan tidak mengandung kecurangan.

Kecurangan akuntansi adalah masalah serius yang dapat merusak perusahaan dan mengakibatkan kerugian finansial besar. pengendalian internal yang baik sangat penting untuk menghindari dan menemukan kecurangan akuntansi. Meskipun demikian, pengendalian internal tidak cukup untuk menjamin akuntansi yang akurat faktor moralitas individu dan budaya organisasi pemerintah

sangat penting dalam mencegah atau mendorong kecurangan akuntansi (Anggara, Yogi et., 2020). Kecurangan akuntansi mengacu kepada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyesatkan pembaca/pengguna laporan keuangan Tujuan ini dilakukan dengan motivasi negatif guna mengambil keuntungan individu atau pihak-pihak tertentu menurut (Widiyanti, 2019). pada UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal korupsi di rumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindakan pidana Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat korupsinya memiliki peringkat dari negara-negara di dunia Menurut (*Indonesia Corruption Watch 2023*)



Gambar 1.1 Tren Korupsi Dalam 5 Tahun Terakhir (2018-2022)

Jenis *fraud* yang sering terjadi pada sektor pemerintahan adalah korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio–Corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, korupsi tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang melanggar hukum, dengan tujuan memperkay diri sendiri, menguntukan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, serta menyalahgunakan kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada tahun 2018, Indonesia Corruption Watch menemukan 579 kasus korupsi yang telah ditangani dan diproses oleh otoritas juga menetapkan tersangka sebanyak 116 orang, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 4,747 Triliun kasus korupsi dari dua sebelumnya lebih banyak diproses oleh aparat penegak hukum. Selama tahun 2018 setidaknya 3 (tiga) pejabat tinggi negara didakwa atas kasus korupsi. Dua ini antaranya adalah menteri aktif, kalangan politisi, dan satu anggota DPR yang menjadi tersangka pada tahun 2018. Selain itu, pada tahun 2018, terdapat 43 kepala daerah dan 81 anggota DPRD yang menjadi tersangka korupsi.

Daerah aparat penegak hukum utama menangani kasus korupsi. Sebagian besar tersangka korupsi pada tahun adalah pejabat pemda atau kementerian. Pada semester 1, 2018 direktur, komisaris, konsultan, dan pegawai swasta berada di urutan kedua tersangka korupsi. Di sisi lain, pada semester II, 2018 pelaksana proyek (PP) pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), kuasa pengguna anggaran (KPA), dan pejabat pembuatan komitmen (PPK) adalah kelompok yang sangat penting dalam pengadaan barang dan jasa (Watch Corruption Indonesia, 2023). Pengendalian internal lemah yang tidak diawasi, dipantau, dan dievaluasi secara sistematis oleh pemimpin berhubungan dengan kecurangan akuntansi. Selain itu, faktor internal lainnya berasal dari individu, yaitu moralitas individu, yang berarti setiap orang akan berusaha melakukan tugasnya dengan baik tanpa meminta balasan. Faktor internal lainnya juga didukung oleh budaya organisasi yang lemah, yang membuat sikap dan perilaku anggota organisasi mudah goyah untuk melakukan kecurangan.

Kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) telah mendapat banyak perhatian dari media sebagai kejadian rutin. Ada pendapat bahwa tindak kecurangan akuntansi dapat digambarkan sebagai kecenderungan Kecurangan Akuntansi dalam definisi yang terdiri dari menghilangkan fakta-fakta kritis pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan dan pengungkapan fakta (Arie,2008). Indikasi adanya kecurangan akuntansi dapat dilihat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan serta kebijakan yang dimaksudkan untuk melakukan pemerasan atau bentuk manipulasi lainnya yang

merugikan pihak lain IAI (2001) menggambarkan kecurangan akuntansi sebagai penghilangan jumlah atau pengungkapan yang disengaja dari laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan, atau sebagai kekeliruan yang diakibatkan oleh kecurangan dalam pelaporan kecurangan. Pencurian asset entitas yang mengakibatkan kesalahan representasi karena penanganan aset yang salah penyalahgunaan atau penggelapan yang mencegah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar akuntansi keuangan adalah peraturan yang digunakan dalam kegiatan akuntansi, sesuai dengan perayuran pemerintah Nomor 24 tahun 2005 Republik Indonesia. Kepatuhan terhadap aturan akuntansi diukur dengan tingkat kesesuaian prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan dokumentasi pendukung (Thoyyibatun,2012).

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2023 mendapatkan Predikat sebagai Pemerintah Daerah yang berdedikasi Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi di provinsi Lampung tetapi termasuk 11 besar provinsi paling besar dalam korupsi dengan kerugian negara sebesar 40,366 juta rupiah (Kejaksaan & Kajati, n.d.), akan tetapi selama tahun 2023 ini, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung beserta jajaran di tingkat kejaksaan negeri (kejari) menyelidiki 115 kasus korupsi dan telah mampu menyelamatkan uang negara sebesar Rp 11.063.033.764,26 dengan rincian sebagai berikut: Kejati Lampung Rp 6.987.456.852, Kejari Tulang Bawang Rp 1.180.947.600, Kejari Lampung Timur Rp 889.376.670, Kejari Metro Rp 432.045.468, Kejari Lampung Barat Rp 399.044.115, Kejari Lampung Utara Rp 355.000.000, Kejari Tanggamus Rp 258.450.000, Kejari Tulang Bawang Barat Rp 220.669.059, Cabjari Krui Rp 136.300.000, Kejari Lampung Tengah Rp 125.237.000, Kejari Pesawara Rp 78.507.000 (DPR RI, 2023).

Provinsi Bandar Lampung termasuk daerah dengan jumlah uang pengembalian hasil korupsi yang sangat besar yaitu sebesar Rp 6.987.456.852 dan juga memiliki kasus penyimpangan yang cukup banyak serta melibatkan pejabat daerah yang masih aktif. Contoh kasus yang terjadi pada Provinsi Bandar Lampung adalah kasus Korupsi Tunjangan Kerja pada Kejari Bandar Lampung yang melibatkan Kaur Kepegawaian dan Keuangan, bendahara keuangan, dan Operator

daftar gaji yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,3 miliar, kasus Korupsi Dana Hibah KONI yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,57 M, dan kasus Korupsi Restribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung yang melibatkan kepala Dinas DLH Bandar Lampung dan Ketua proyek tersebut sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,38 miliar (DPR RI, 2023).

Setiap pelaku kecurangan memiliki motivasi yang beragam salah satu teori yang menjelaskan motivasi seseorang dalam melakukan kecurangan adalah teori Triangle yang dikembangkan oleh Cressey (1953) dalam Tuanakotta (2010) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya fraud, yaitu Tekanan (*pressure*), Kesempatan (*opportunity*), dan Rasionalisasi (*rationalization*).

Tekanan (*pressure*) merupakan elemen yang berasal dari keadaan pribadi yang mendorong seorang melakukan kecurangan. Tekanan dari dalam diri seseorang tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat kerja dapat mempengaruhi tekanan internal. Tekanan dari dalam diri seseorang tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat bekerja. Tekanan ini terjadi karena adanya beberapa kasus keserakahan seseorang (Nurjanah & Setiawan, 2021).

Kesempatan (*opportunity*) peluang adalah kesempatan yang memungkinkan fraud terjadi ini biasanya terjadi karena control internal organisasi yang buruk, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Peluang salah satu dari tiga faktor resiko kecurangan (tekanan, kesempatan dan pembenaran) peluang adalah yang paling penting dan dapat terjadi kapan saja, sehingga memerlukan pengawasan dari tingkat paling atas organisasi. dalam sebuah organisasi, sistem pengendalian internal sangat penting untuk melindungi organisasi dari kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Pengendalian internal yang baik dan efektif akan mencegah kecurangan. Peraturan dibuat agar operasi organisasi dapat berjalan dengan baik dan efisien semua karyawan harus mematuhi peraturan ini apabila mereka melanggar, mereka biasanya akan diberi hukuman atau sanksi agar mereka tidak melakukannya lagi. menemukan Sistem pengendalian Internal merupakan suatu

kondisi yang memungkinkan seseorang bisa melakukan kecurangan. Kondisi tersebut sebenarnya dapat dikendalikan oleh perusahaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kondisi tersebut dalam lingkup entitas pemerintahan antara lain penegakan peraturan, keefektifan sistem pengendalian internal, dan asimetri informasi (Setiawan & Helmayunita, 2017)

Rasionalisasi (*Rationalization*) rasionalisasi adalah komponen penting dalam banyak penyebab kecurangan, pembenaran diri yang mengembangkan argumen untuk membenarkan perilaku tidak etis. Faktor rasionalisasi sering diamati melalui teori perkembangan moral seperti yang dilakukan dalam penelitian-penelitian etika. Albrecht (2004) Menemukan Moralitas Individu bahwa salah satu motivasi individu dalam melakukan kecurangan akuntansi adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi individu dengan level penalaran moral rendah cenderung akan memanfaatkan kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal dalam organisasi tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Sistem Pengendalian Internal adalah program organisasi dan lembaga pemerintahan untuk melindungi hak milik mereka, meningkatkan efisiensi bisnis, membantu memeriksa keakuratan dan keandalan data akuntansi yang ada, dan memungkinkan untuk mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Selain pengendalian internal. hasil penelitian (Sari et., 2019) menyatakan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Ike Abdi Nurjanah & Mia Angelina Setiawan, 2021) dan (Febriani & Anik, 2020) Menunjukkan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal yang positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustika & Basuki, 2022) dan (Agung K Anak et., 2017) yang menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan.

Moralitas Individu merujuk pada nilai, prinsip, dan etika yang dimiliki oleh setiap individu. Dalam konteks praktik akuntansi pemerintah, moralitas individu berperan penting dalam menentukan integritas dan kejujuran dalam pelaporan keuangan. Individu yang memiliki moralitas tinggi cenderung menunjukkan perilaku yang etis dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas akuntansi

mereka, sehingga dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan pemerintah. penelitian yang dilakukan oleh (Febriani & Anik, 2020) Menunjukkan bahwa dengan adanya Moralitas Individu yang positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ni Komang Nitimiani et al., 2020) moralitas individu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan. Menurut penelitian (Agung K Anak et., 2017) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan.

Budaya Organisasi mencerminkan nilai-nilai, norma, dan praktik yang dianut oleh anggota organisasi. budaya organisasi yang kuat dan mendukung transparansi, akuntabilitas, dan integritas akan mempengaruhi kecenderungan praktik akuntansi pemerintah. Budaya organisasi yang mempromosikan etika dan kejujuran akan mendorong para pegawai pemerintah Kota bandar lampung untuk mengikuti standar-standar akuntansi yang baik dan menghindari praktik-praktik yang tidak etis Dengan memperhatikan pengendalian internal yang baik, moralitas individu yang tinggi, dan budaya organisasi yang mendukung integritas dan transparansi, pemerintah desa dapat meningkatkan kecenderungan praktik akuntansi yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini akan membantu memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Budaya organisasi adalah adanya kesamaan pengetahuan social dalam sebuah organisasi terhadap aturan-aturan, norma-norma dan nilai-nilai yang membentuk sikap dan perilaku setiap anggotanya menurut Colquitt et.al (2009). Penelitian Dian mustika et.al (2022) budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan dalam.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Rahandhika Ivan Adyaksana dan Lia Nadia Sufitri yang berjudul pengaruh pengendalian internal, moralitas individu dan budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian sebelumnya telah menghubungkan pengendalian internal, moralitas individu, dan budaya organisasi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun, masih banyak ruang untuk penelitian lebih lanjut dalam konteks ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam pengaruh pengendalian internal, moralitas individu, dan budaya organisasi terhadap

kecenderungan kecurangan akuntansi dalam konteks yang lebih luas dan mendalam. Penelitian ini memilih kota bandar lampung sebagai objek penelitian dikarenakan menurut berita Lampng (2021) Kota bandar lampung meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Dearah dari BPK perwakilan provinsi Lampung tahun anggaran 2020. Hal tersebut sangat menarik karena kota bandar lampung meraih gelar opini WTP sepuluh tahun kali secara berturut-turut. Persoalan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah penguji dan pemangku kepentingan dapat mengetahui sejauh mana pengaruh pengendalian internal moralitas individu dan budaya organisasi terhadap kecurangan akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengidentifikasi pengaruh pengendalian internal, moralitas individu dan budaya organsasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah kabupaten bandar lampung.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti emperis tentang pengaruh sistem penendalian internal, moralitas individu dan budaya organsasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya serta memberi kontribusi pada masing-masing pada dinas pemerintah daerah kota bandar lampung di lampung sehingga penelitian yang berbeda oleh karena itu peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan berjudul **“Determinan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi semua Dinas Kabupaten Bandar Lampung di Lampung pada subbagian keuangan hal ini dilakukan karena Kabupaten Bandar Lampung merupakan salah satu Kabupaten yang menerima pengambalian uang yang cukup besar dari kasus korupsi, sebesar Rp. 6.987.456.852. karena itu penelitian ini difokuskan pada Dinas Kabupaten Bandar Lampung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

1.4 Tujuan masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.5 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya, penerapan pengendalian internal, moralitas individu dan budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

2. Manfaat Praktis

Bagi Peneliti, penelitian ini yaitu salah satu bentuk tugas akhir untuk menyelesaikan studi S1 dan menjadi penelitian di Program Studi Akuntansi Publik, serta untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, moralitas individu dan budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

pemerintah. implementasi ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan sehingga diharapkan mampu menambah wawasan terkait penelitian yang dilakukan.

3. Bagi Jurusan

Bagi Jurusan, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan yang digunakan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah akuntansi publik.

4. Bagi Kampus

Bagi Kampus, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan implementasi dan menjadi informasi untuk pengembangan mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan serupa selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan urutan penyajian isi dari penelitian secara sistematis, rapi, dan terstruktur. Penelitian ini terdiri dari tiga bab yang masing-masing terdiri dari sub bab pembahasan sebagai acuan berpikir secara sistematis.

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori, dan variable y, variable x, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan bangunan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, populasi, sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisa data dan pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulisan tentang analisis penulisan atas penelitian yang dilakukan hasil-hasil statistik diinterpretasikan dan pembahasan dikaji secara mendalam sehingga hasil analisis dari penelitian.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis membahas secara singkat mengenai kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, saran dan keterbatasan dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**